



Media: Republika

Hari: Rabu

Tanggal: 08 Maret 2017

Halaman: 21

12 Kelurahan Yogya Ditargetkan Bebas Kumuh

● YULIANINGSIH

Setiap kelurahan yang masuk program ini akan memperoleh bantuan dana sebesar Rp 500 juta per tahun.

YOGYAKARTA — Kementerian Perencanaan Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tahun ini menargetkan beberapa wilayah di Kota Yogyakarta, DIY, bebas dari kawasan kumuh. Dari 33 wilayah kawasan kumuh yang ada di bantaran kali di Kota Yogyakarta, 12 wilayah diprioritaskan lolos dari predikat kumuh melalui program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku).

Direktur Perkotaan Perumahan dan Permukiman Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Tri Dewi Virgianti mengatakan selain di Kota Yogyakarta pihaknya juga menggelar program yang sama di beberapa kota lain di Indonesia.

Tahun ini kata dia, Kota Yogyakarta menjadi bagian dari 249 kota

dan kabupaten di Indonesia yang menjalankan program Kotaku tersebut. "Ini upaya pemerintah untuk menjadikan Kota Yogyakarta dan Indonesia Bebas Kumuh pada 2019," ujarnya di Balai Kota Yogyakarta, Selasa (7/3).

Sebanyak 12 wilayah yang mendapat sentuhan program ini adalah kelurahan Klitren, Bacio, Bumijo, Tegalsrejo, Kricak, Brontokusuman, Sorosutan, Purbayan, Prawirodirjan, Ngupasan, Pakuncen, dan Pringgokusuman. Sebagian besar wilayah yang masuk dalam program ini berada di bantaran sungai.

Menurutnya, setiap kelurahan yang masuk program ini akan memperoleh bantuan dana sebesar Rp 500 juta per tahun yang akan diberikan secara rutin tiap tahun hingga 2021 untuk mendukung berbagai program penataan kawasan kumuh yang sudah direncanakan wilayah.

Beberapa program yang bisa di biayai dengan dana ini adalah proyek fisik, sarana dan prasarana, infrastruktur, sanitasi dan penataan lingkungan untuk penataan kawasan kumuh.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta Edy Muhammad mengatakan akan berupaya memenuhi tar-

get nol persen kawasan kumuh dalam tiga periode dari 2017 hingga 2019.

Menurutnya, 21 kelurahan lain yang masuk kawasan kumuh akan menjadi prioritas selanjutnya. "Setiap tahun akan ada 10 kelurahan hingga 2019 kami targetkan semua masuk program," ujarnya.

Diakukannya, penataan kawasan kumuh diawali dengan penyusunan Detail Engineering Design (DED) oleh warga di wilayah tersebut dengan mendasarkan indikator penataan yang sudah ditetapkan seperti jalan lingkungan, drainase, sanitasi, air minum, kebukaran, dan ruang terbuka publik.

15 kelurahan bebas kumuh

Sementara itu, Pemerintah Kota Solo, Jawa Tengah, menargetkan sebanyak 15 Kelurahan menjadi sasaran dalam pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) tahun ini. Di antara kelurahan tersebut yakni Nusukan, Gilingan, Kadipiro, Sumber, Pajang, Mojosoongo, Kedunglumbu, Banyuanyar, Sangkrab, Jebres, Tipis Sondakan dan Manahan.

Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo mengungkapkan pelaksanaan program Kotaku tak hanya akan dilakukan oleh Pemkot Solo, melainkan secara bersama-sama dengan pemerin-

tah provinsi dan pemerintah pusat. "Untuk penanganan kawasan kumuh di Kota Solo dikerjakan bersama-sama baik pemkot, provinsi, dan pemerintah pusat. Semuanya turun tangan sehingga tidak hanya dibebankan kepada daerah saja," tutur Rudyatmo di Balai Kota Solo, Senin (6/3).

Dia berharap melalui program tersebut Kota Solo dapat terbebas dari kawasan kumuh dengan target pada 2019. Saat ini, jumlah rumah tidak layak huni di Kota Solo lebih dari 13 ribu unit. Ia mengatakan Pemkot Solo pun terus berupaya melakukan penataan terhadap kawasan kumuh melalui sejumlah kebijakan seperti merelokasi warga di sepanjang bantaran sungai dan membangun rumah deret bagi warga.

Selain itu, Pemkot Solo juga telah membangun sejumlah rumah susun sewa sederhana terutama bagi warga terdampak relokasi.

"Pemkot secara bertahap dalam penanganan kawasan kumuh, targetnya 2019 Solo bebas dari kawasan kumuh," kata dia. Rudyatmo menjelaskan untuk anggaran program tersebut tak hanya menggunakan dana dari APBD Kota Solo saja, tetapi juga berasal dari APBD provinsi dan APBN pemerintah pusat.

■ andrian saputra edy fernan rahadi

-Bappeda
Netral
Biasa
Untuk Diketahui

Instansi

1.
2.
3.
4.
5.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Badan Perencanaan Pembangunan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas PUPKP			

Yogyakarta, 07 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005